

Judul : Soal smelter Freeport, Golkar tak masalah dibangun di Gresik
Tanggal : Rabu, 25 November 2020
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Soal Smelter Freeport Golkar Tak Masalah Dibangun Di Gresik

SENAYAN silang pendapat soal kewajiban PT Freeport Indonesia (PTFI) membangun *smelter* di Papua. Sementara, PTFI tengah membangun *smelter* di Gresik. Progres pembangunannya hingga September 2020 baru mencapai 5,86 persen.

Anggota Komisi VII DPR Maman Abdurrahman mengatakan, pemerintah wajib mengingatkan perusahaan tambang untuk membangun *smelter*. Kebijakan tersebut merupakan harga mati sebagai upaya mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah.

Setidaknya, ada enam komoditi yang wajib membangun *smelter*. Untuk jenis usaha nikel sudah ada 30 *smelter* yang dibangun, bauksit 11 *smelter*, tembaga, besi dan mangan masing-masing empat *smelter*. Lalu timbal dan seng dua *smelter*.

Persoalannya, kata dia, proses hilirisasi ini seperti tembaga menuju konsentrat setengah jadi, hanya bernilai tambah di atas 9 persen. Padahal, investasi yang dibutuhkan untuk membangun *smelter* ini cukup besar.

"Pertanyaan saya apakah ini cukup ekonomis?" tanya Maman dalam rapat kerja di Komisi VII DPR, Jakarta, kemarin.

Dia menegaskan tidak membela kepentingan PTFI mengenai pembangunan *smelter* ini. Diketahui, pemerintah memiliki saham sebesar 51 persen (41 persen dimiliki Badan Usaha Milik Negara dan 10 persen Badan Usaha Milik Daerah) di PTFI.

"Ini murni untuk (BUMN) Inalum, karena suka atau tidak suka beban dia pada saat harus investasikan pembangunan *smelter* akan berdampak pada kondisi keuangan BUMN kita. Tentunya saat investasikan ini ujung-ujungnya BUMN nyari

duit. Pertanyaan saya, dari mana tuh duitnya kalau mau bangun *smelter*," terang dia.

Karena itu, dia meminta pembangunan *smelter* oleh PTFI dievaluasi ulang dengan melihat segi kemanfaatannya bagi bangsa dan negara.

"Kalau ada yang bilang membangun *smelter* bisa menyerap lapangan kerja, saya ingin tanya berapa sih jumlah tenaga kerja yang akan terserap dengan *smelter* ini. Hitungan saya paling 400-an orang," terang politisi Golkar ini.

Karena itu, dia memohon maaf kepada koleganya dari Papua atas pernyataan itu. Sebab, akan selalu muncul pertanyaan andai saja ada 500 orang tenaga kerja yang bakal terserap dari pembangunan *smelter*, berapa orang Papua yang akan bisa diterima.

"Saya pikir presentasinya akan kecil. Dari sisi penyerapan tenaga kerja membangun *smelter* di Freeport pun tidak berimplikasi maksimal," katanya.

Sebaliknya, anggota Komisi VII DPR Rico Sia meminta masalah *smelter* ini tidak mengucilkan masyarakat Papua.

Menurutnya, sah-sah saja jika Maman berpikir bahwa PTFI boleh ekspansi bikin apa saja di Gresik yang pada akhirnya adalah buat kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Saya juga tetap berpendapat bahwa apa sih yang penduduk Papua dapat? Itu saya harus pertahankan juga sebagai wakil Papua karena yang ada di sana tinggal lubang-lubang saja," kata politisi Nasdem dapil Papua Barat ini.

Menurut dia, harusnya ada kompensasi yang ditawarkan PTFI demi kemaslahatan masyarakat Papua. Sehingga nantinya, aktivitas pertambangan tidak sampai membuat orang Papua merasa tidak mendapatkan manfaatnya. ■ KAL